

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi*

*Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**OLEH:**

**RATIH**

**1710843007**

**Dibimbing Oleh:**

- 1. Wewen Kusumi Rahayu S.AP, M.Si**
- 2. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2021**

## ABSTRAK

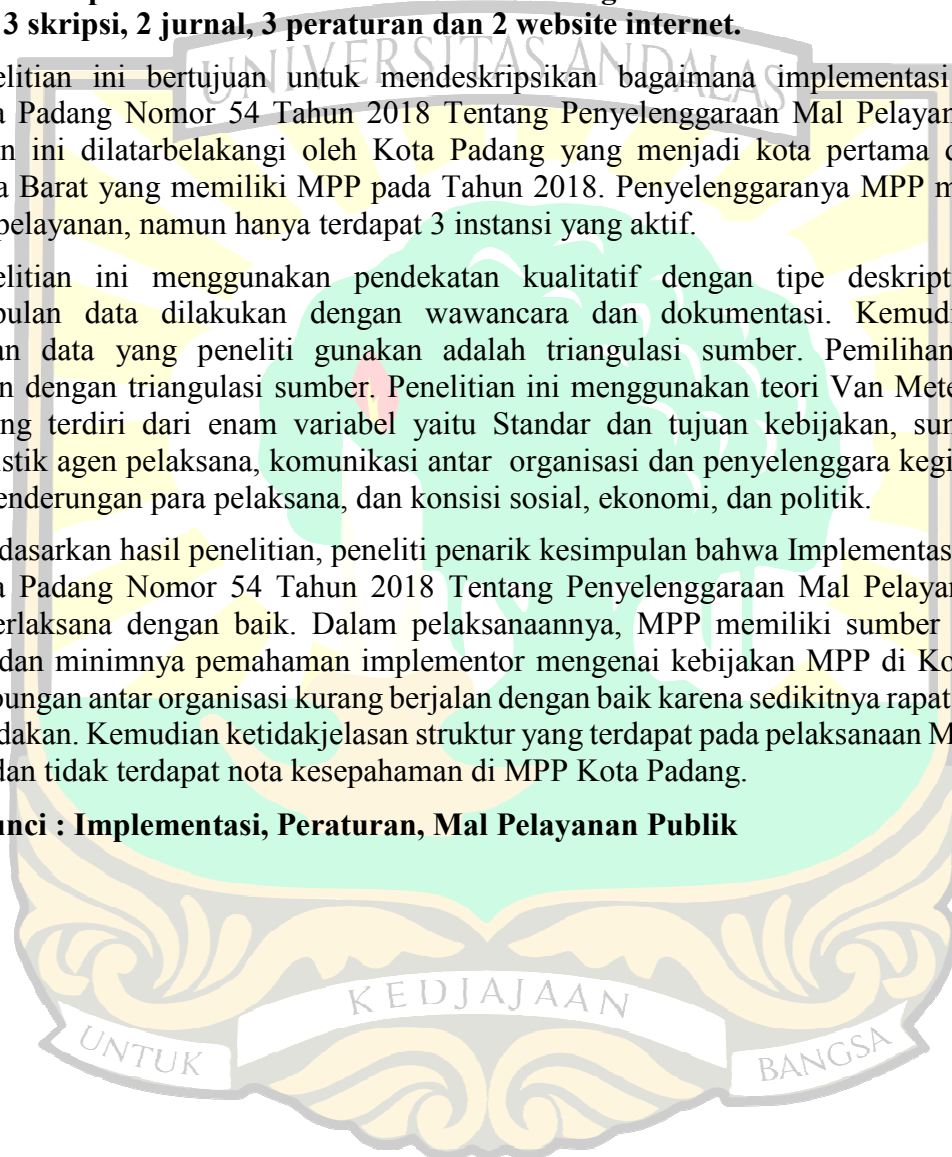
**Ratih, No BP 1710843007, Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021, Dibimbing oleh: Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc. Skripsi ini terdiri dari 132 halaman dengan referensi 8 buku teori, 3 buku metode, 3 skripsi, 2 jurnal, 3 peraturan dan 2 website internet.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kota Padang yang menjadi kota pertama di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki MPP pada Tahun 2018. Penyelenggaranya MPP memiliki 16 instansi pelayanan, namun hanya terdapat 3 instansi yang aktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggara kegiatan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan konsisi sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MPP memiliki sumber daya yang terbatas dan minimnya pemahaman implementor mengenai kebijakan MPP di Kota Padang. Pada hubungan antar organisasi kurang berjalan dengan baik karena sedikitnya rapat koordinasi yang diadakan. Kemudian ketidakjelasan struktur yang terdapat pada pelaksanaan MPP di Kota Padang dan tidak terdapat nota kesepahaman di MPP Kota Padang.

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Mal Pelayanan Publik**



## ABSTRAC

**Ratih, No BP 1710843007, Implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 54 of 2018 concerning the Implementation of Public Service Malls. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2020, Supervised by: Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc. This thesis consists of 132 pages with references from 7 theory book, 3 method books, 3 theses, 2 journals, 3 mayor regulations, and 2 internet websites.**

This study aims to describe how the implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 54 of 2018 concerning the Implementation of Public Service Malls. This research was motivated by the city of Padang which became the first city in West Sumatra Province to have a public service mall in 2018. Public service mall (MPP) has 16 service organizations, but only four active organizations are in operation.

This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique is done by interview and documentation. The data validity technique is based on source triangulation. The selection of informants was carried out by triangulation of sources.

This study uses the Van Meter and Van Horn theory which consists of six variables: standards and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations and activity organizers, attitudes or tendencies of the implementers, and social, economic and political conditions.

Based on the results of the research, the researcher draws the conclusion that the implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 54 of 2018 concerning the Implementation of Public Service Malls has not been carried out properly. In its implementation, MPP has limited resources and the implementor's lack of understanding of MPP policies in Padang City. Interorganizational relationships are not go well due to the absence of organizational coordination meetings, the structural ambiguity and there are no certificate of understanding of MPP in Padang city

**Key word : Implementation, regulation, public service malls.**

